



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950  
No.Telp 021-22859672 ; Website : [www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id) ; E-mail : [ptun.jakarta@gmail.com](mailto:ptun.jakarta@gmail.com)

Jakarta, 03 Desember 2025

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Di –

Jakarta

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 4250/KPTUN.W2.TUN1/PW1.1.1/XII/2025

Bersama ini dikirimkan dengan hormat, laporan bulanan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bulan November 2025 bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai bahan evaluasi dan monitoring pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, demi meningkatkan kinerja pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa.



**KETUA PTUN JAKARTA**

Ditandatangani secara elektronik

HUSBAN f



Tembusan :

1. Arsip





PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



# LAPORAN BULANAN BULAN NOVEMBER 2025

# bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Contact Us  
**(021) 22859672**



More Information  
**www.ptun-jakarta.go.id**



Our Office  
**Jl. A. Sentra Primer Bar  
Pulo Gebang Jakarta T**



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSN. 150

## DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Dasar .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Jenis Laporan .....	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS .....	2
A. Kesekretariatan .....	2
B. Kepaniteraan .....	16
BAB III. TELAAHAN .....	24
BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN .....	25



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara ( PERATUN ) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

#### C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

##### 1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

##### 2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

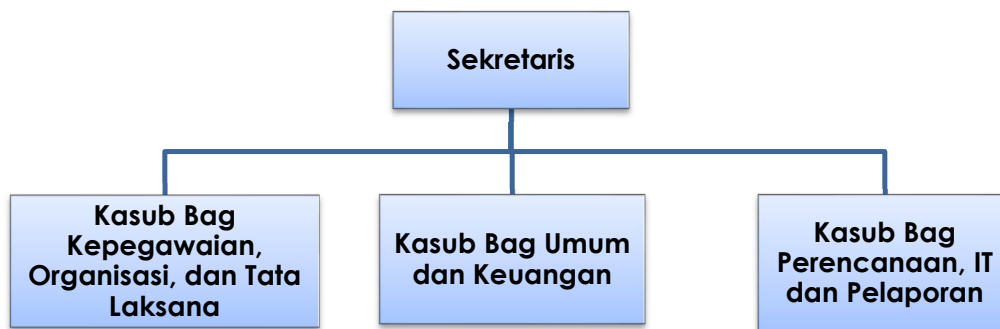
## BAB II

### PELAKSANAAN TUGAS

#### A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprass di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



#### - SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

##### a. Jumlah Pegawai

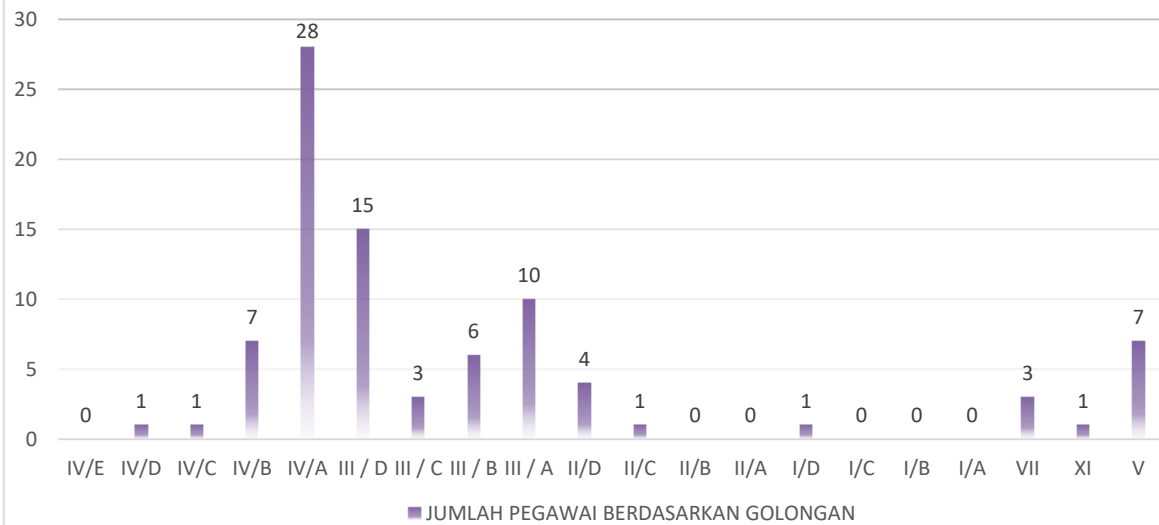
Jumlah Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 30 November 2025 adalah 73 Orang PNS, 4 orang CPNS, 11 Orang PPPK ( P3K ), yang terdiri dari Laki-laki yang berjumlah 59 orang dan Perempuan 29 Orang.

Adapun rinciannya sebagai berikut :



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



### Mutasi

#### Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.				

#### Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.				

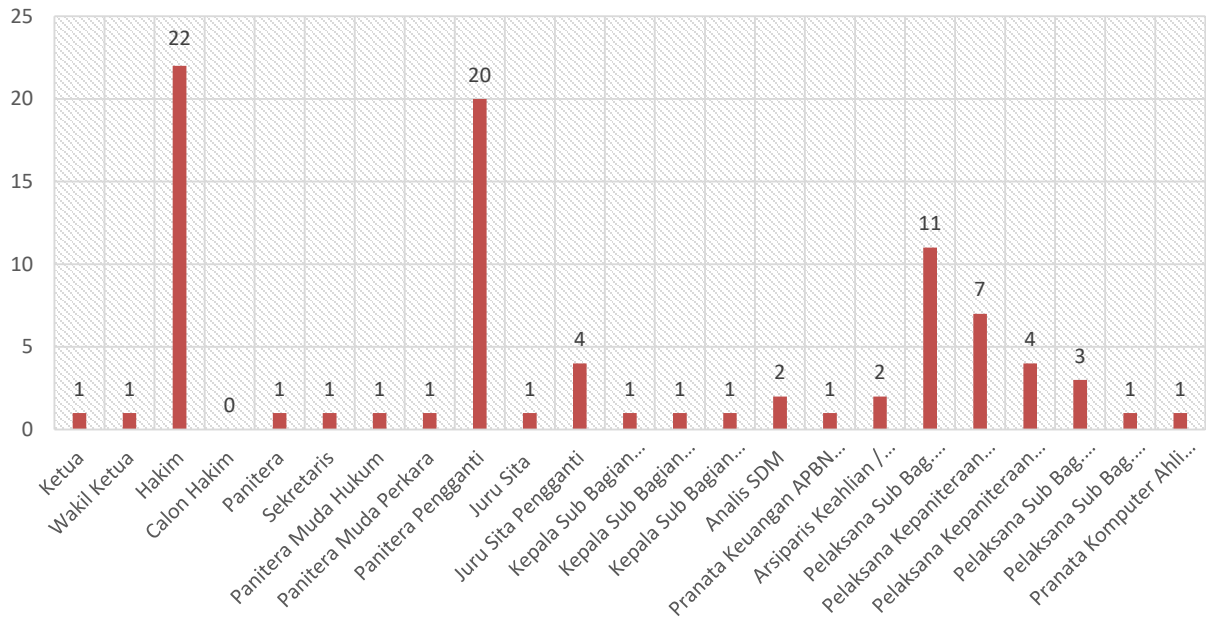
#### DATA HAKIM / PEGAWAI BARU:

NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN	KET



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



## KEPEGAWAIAN



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Masuk

NO	SUB. BAGIAN	SURAT MASUK				JUMLAH
		DARI	BIASA	PENTING	RAHASIA	
1		MAHKAMAH AGUNG RI	4	0	0	4
2		PT. TUN-Jakarta	1	0	0	1
3		BALITBANG DIKLAT KUMDIL	1	0	0	1
4	PERSURATAN	DIRJEND. BADIMIL TUN	8	0	0	8
5		KOMISI YUDISIAL	0	0	0	0
6		PERKARA/LAIN-LAIN	416	0	0	416
7		UMUM/LAIN-LAIN	55	0	0	55
<b>TOTAL</b>						<b>485</b>

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			JUMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub.Bag.Kepegawaian dan Ortala	96	0	0	96
2	Sub.Bag.Umum dan Keuangan	39	0	0	39
3	Sub.Perencanaan, TI,dan Pelaporan	3	0	0	3
4	Kepaniteraan Muda Perkara	138	0	0	138
5	Kepaniteraan Muda hukum	22	0	0	22
6	Lain-lain	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>					<b>298</b>

2) Tata Kearsipan :

Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer ( ADK ) sehingga memudahkan dalam pencarian.

3) Inventaris dan Persediaan :

Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara ( SIMAK BMN ) dan aplikasi Persediaan.



## LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Untuk bulan November Tahun 2025 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :

No	Nama Barang	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Jumlah
1	A.C. Split	4		28	32
2	Acces Point	5			5
3	Air Conditioning (AC)	18			18
4	Amplifier			3	3
5	Asbak Tinggi			1	1
6	Audio Mixing Console	1			1
7	Bangku Panjang Besi/Metal	7		17	24
8	Bracket Standing Peralatan	8			8
9	Brandkas			1	1
10	Buffet			1	1
11	Buku Lainnya	18			18
12	Camera Conference	1			1
13	Camera Digital	2			2
14	CCTV - Camera Control Television System	26			26
15	Digital LED Running Text	1			1
16	Dispenser	7			7
17	Facsimile	2			2
18	Filing Cabinet Besi	41		1	42
19	Filing Sealing	73			73
20	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	4			4
21	Gedung Pos Jaga Permanen	1			1
22	Genset	1			1
23	Jam Mekanis			6	6
24	Kipas Angin		3		3
25	Komponen/Alat Pengolah Data	26			26
26	Komputer Jaringan Lainnya	29			29
27	Kursi Besi/Metal	606		1	607
28	Kursi Kayu	55		14	69
29	Lambang Garuda Pancasila	6			6
30	Lambang Instansi	7			7
31	Lap Top	9			9
32	Layar Film/Projector	1			1
33	LCD Monitor	1			1
34	LCD Projector/Infocus	1			1
35	Lemari Besi/Metal	17	8	7	32
36	Lemari Kayu	2		22	24
37	Lemari Penyimpan	35			35
38	Loudspeaker	4		5	9
39	Meja Kerja Kayu	173		28	201
40	Meja Komputer			3	3
41	Meja Makan Besi	5			5
42	Meja Rapat	39			39
43	Meja Resepsionis	1		1	2
44	Mesin Absensi	1			1



## LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

45	Mesin Antrian	2			2
46	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1
47	Microphone	13			13
48	Microphone/Wireless MIC	1			1
49	Mimbar/Podium	1			1
50	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1			1
51	Mixer	3			3
52	Mixer Sound Sistem	1			1
53	Modem	1			1
54	Monografi	2			2
55	Movitex Board	1			1
56	Note Book	23			23
57	P.C Unit	42			42
58	Palu Sidang	1		5	6
59	Panggung	2			2
60	Papan Gambar	1			1
61	Papan Pengumuman	6			6
62	Peralatan Komputer Lainnya	2			2
63	Perkakas Kantor Lainnya	10			10
64	Pesawat Telephone	18		24	42
65	Piagam	3			3
66	Piala	12			12
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29		10	39
68	Public Address Branch Exchange (PABX)	1			1
69	Rak Besi	134		22	156
70	Rak Server	1			1
71	Router	5			5
72	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen		2		2
73	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		2	2	4
74	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8			8
75	Sedan	2		1	3
76	Sepeda Motor	7	1		8
77	Server	3			3
78	Sofa	27			27
79	Software Komputer		4		4
80	Sound System	1			1
81	Stempel Timbul/Bulat	1			1
82	Tabung Pemadam Api	9			9
83	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1			1
84	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4			4
85	Tangga Aluminium	1			1
86	Telepon Digital	4			4
87	Televisi			1	1
88	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1		1	2
89	Wireless	1			1
90	Workstation	1			1
	<b>Total</b>	<b>1626</b>	<b>20</b>	<b>205</b>	<b>1851</b>

Note : Tabung Pemadam Api berjumlah 24 Tabung, 12 tabung expired 2027, 12 tabung expired agustus 2025. baru terdaftar di siman 9 tabung.

Sedang berkoordinasi dengan biro perlengkapan terkait penangannya.



## **LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA**

### 4) Perpustakaan :

Untuk Bulan November 2025 Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## b. Keuangan

### Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode November 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>18,572,150,000</b>	<b>0</b>	<b>16,566,735,380</b>	<b>1,280,802,496</b>	<b>17,847,537,876</b>	<b>96.10 %</b>	<b>724,612,124</b>
WAProgram Dukungan Manajemen	18,572,150,000	0	16,566,735,380	1,280,802,496	17,847,537,876	96.10 %	724,612,124
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	222,190,000	0	139,500,000	82,417,500	221,917,500	99.88 %	272,500
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	222,190,000	0	139,500,000	82,417,500	221,917,500	99.88 %	272,500
EBB.901 Layanan Sarana Internal	222,190,000	0	139,500,000	82,417,500	221,917,500	99.88 %	272,500
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	222,190,000	0	139,500,000	82,417,500	221,917,500	99.88 %	272,500
053.0A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	222,190,000	0	139,500,000	82,417,500	221,917,500	99.88 %	272,500
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222,190,000	0	139,500,000	82,417,500	221,917,500	99.88 %	272,500
000001. AC 2 PK	89,690,000	0	89,600,000	0	89,600,000	99.90 %	90,000
000002. Mesin Antrian Sidang	50,000,000	0	49,900,000	0	49,900,000	99.80 %	100,000
000105. Pengadaan Meubelair	82,500,000	0	0	82,417,500	82,417,500	99.90 %	82,500
WA.6980 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Bando dan Tingkat Pertama	18,349,960,000	0	16,427,235,380	1,198,384,996	17,625,620,376	96.05 %	724,339,624
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	18,349,960,000	0	16,427,235,380	1,198,384,996	17,625,620,376	96.05 %	724,339,624
EBA.902 Layanan Umum	700,000	0	0	700,000	700,000	100.00 %	0
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700,000	0	0	700,000	700,000	100.00 %	0
051.0A Pengadaan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	700,000	0	0	700,000	700,000	100.00 %	0
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0	0	700,000	700,000	100.00 %	0
000095. Printer Hp Laserjet P1102	700,000	0	0	700,000	700,000	100.00 %	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	18,348,960,000	0	16,427,235,380	1,197,579,996	17,624,815,376	96.05 %	724,144,624
001 Gaji dan Tunjangan	15,844,142,000	0	14,470,680,852	1,048,023,997	15,518,704,849	97.95 %	325,437,151
001.0A GAJI DAN TUNJANGAN	15,844,142,000	0	14,470,680,852	1,048,023,997	15,518,704,849	97.95 %	325,437,151
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	4,829,045,000	0	4,488,901,840	315,137,800	4,804,039,640	99.48 %	24,945,360
000003. Belanja Gaji Pokok PNS	4,129,749,000	0	3,789,671,100	315,137,800	4,104,808,900	99.40 %	24,940,100
000004. Belanja Gaji Pokok PNS ( Gaji ke 14)	347,323,000	0	347,322,120	0	347,322,120	100.00 %	880
000005. Belanja Gaji Pokok PNS ( Gaji ke 13)	351,973,000	0	351,908,020	0	351,908,020	100.00 %	4,380
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	61,000	0	55,121	3,734	58,855	96.48 %	2,145

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode November 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS	51,000	0	46,017	3,734	49,751	97.55 %	1,249
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS ( Gaji ke 13)	5,000	0	4,408	0	4,408	88.16 %	592
000008. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	5,000	0	4,696	0	4,696	93.92 %	304
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	361,754,000	0	335,168,800	24,405,538	359,574,338	99.40 %	2,179,602
000009. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	310,010,000	0	283,466,728	24,405,538	307,872,266	99.31 %	2,137,734
000010. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 13)	26,047,000	0	26,042,226	0	26,042,226	99.98 %	4,774
000011. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS ( Gaji ke 14)	25,697,000	0	25,659,906	0	25,659,906	99.86 %	37,094
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	119,988,000	0	110,160,398	8,169,392	118,329,790	96.62 %	1,658,210
000012. Belanja Tunjangan Anak PNS	103,228,000	0	93,460,114	8,169,392	101,629,506	96.45 %	1,598,494
000013. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)	8,455,000	0	8,444,266	0	8,444,266	99.87 %	10,734
000014. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 14)	8,305,000	0	8,256,018	0	8,256,018	99.41 %	48,982
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	38,200,000	0	34,920,000	2,880,000	37,800,000	96.95 %	400,000
000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS	32,440,000	0	29,160,000	2,880,000	32,040,000	96.77 %	400,000
000016. Belanja Tunj. Struktural PNS ( gaji ke 13 )	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00 %	0
000017. Belanja Tunj. Struktural PNS ( gaji ke 14 )	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	100.00 %	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	786,015,000	0	768,805,000	13,085,000	781,890,000	99.46 %	4,125,000
000018. Belanja Tunj. Fungsional PNS	759,000,000	0	741,795,000	13,085,000	754,880,000	99.46 %	4,125,000
000019. Belanja Tunj. Fungsional PNS ( gaji ke 13 )	13,505,000	0	13,505,000	0	13,505,000	100.00 %	0
000020. Belanja Tunj. Fungsional PNS ( gaji ke 14 )	13,505,000	0	13,505,000	0	13,505,000	100.00 %	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	107,497,000	0	105,430,169	308,637	105,738,806	98.36 %	1,758,194
000021. Belanja Tunj. PPh, PNS	81,734,000	0	79,669,064	308,637	79,977,701	97.85 %	1,706,299
000022. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13 )	13,210,000	0	13,208,943	0	13,208,943	99.99 %	1,057
000023. Belanja Tunj. PPh PNS ( gaji ke 14 )	12,553,000	0	12,552,162	0	12,552,162	99.99 %	838
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	251,525,000	0	232,975,140	16,873,860	249,849,000	99.33 %	1,676,000
000024. Belanja Tunj. Beras PNS	251,525,000	0	232,975,140	16,873,860	249,849,000	99.33 %	1,676,000
511129 Belanja Uang Makan PNS	719,304,000	0	508,372,000	63,004,000	571,376,000	79.43 %	147,928,000
000025. Gol IV ( 29 org x 22 hr x 12 Bln )	251,288,000	0	249,854,000	33,210,000	283,064,000	80.58 %	68,224,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode November 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000026. Gol III ( 32 org x 22 Hr x 12 Bln )	312.576.000	0	229.363.000	25.419.000	254.782.000	81.51 %	57.794.000
000027. Gol II ( 5 org x 22 Hr x 12 Bln )	46.200.000	0	23.695.000	3.640.000	27.335.000	59.17 %	18.865.000
000028. Gol I ( 1 org x 22 Hr x 12 Bln )	9.240.000	0	5.460.000	735.000	6.195.000	67.05 %	3.045.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	60.654.000	0	56.570.000	3.125.000	59.695.000	98.42 %	959.000
000029. Belanja Tunjangan Umum PNS	50.845.000	0	46.980.000	3.125.000	50.105.000	96.54 %	740.000
000030. Belanja Tunjangan Umum PNS ( gaji ke 13 )	4.902.000	0	4.795.000	0	4.795.000	97.82 %	107.000
000031. Belanja Tunjangan Umum PNS ( gaji ke 14 )	4.907.000	0	4.795.000	0	4.795.000	97.72 %	112.000
511324 Belanja Tunj. PPH Pejabat Negara	1.173.799.000	0	1.095.798.594	6.205.414	1.102.004.008	93.88 %	71.794.992
000100. Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara	823.324.000	0	745.324.945	6.205.414	751.530.359	91.28 %	71.793.641
000101. Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara ( gaji ke 13 )	177.014.000	0	177.013.108	0	177.013.108	100.00 %	892
000102. Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara ( gaji ke 14 )	173.461.000	0	173.460.541	0	173.460.541	100.00 %	459
511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	7.169.700.000	0	6.583.000.000	551.400.000	7.134.400.000	99.51 %	35.300.000
000097. Belanja Tunjangan Pejabat Negara ( gaji ke 13 )	1.062.200.000	0	1.062.200.000	0	1.062.200.000	100.00 %	0
000098. Belanja Tunjangan Pejabat Negara ( gaji ke 14 )	522.100.000	0	522.100.000	0	522.100.000	100.00 %	0
000099. Belanja Tunjangan Pejabat Negara	5.585.400.000	0	4.998.700.000	551.400.000	5.550.100.000	99.37 %	35.300.000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	152.700.000	0	116.939.500	29.450.500	146.390.000	95.87 %	6.310.000
000032. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	2.859.000	0	2.858.800	0	2.858.800	99.99 %	200
000033. Belanja Gaji Pokok PPPK	146.982.000	0	111.221.900	29.450.500	140.672.400	95.71 %	6.309.600
000034. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	2.859.000	0	2.858.800	0	2.858.800	99.99 %	200
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.000	0	3.424	920	4.344	62.06 %	2.656
000035. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.000	0	80	0	80	8.00 %	920
000036. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.000	0	80	0	80	8.00 %	920
000037. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000	0	3.264	920	4.184	83.68 %	816
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6.007.000	0	4.079.070	1.359.690	5.438.760	90.54 %	568.240
000038. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 13)	1.000	0	0	0	0	0.00 %	1.000
000039. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6.005.000	0	4.079.070	1.359.690	5.438.760	90.57 %	566.240

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode November 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000040. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	1.000	0	0	0	0	0.00 %	1.000
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.530.000	0	945.816	315.272	1.261.088	82.42 %	268.912
000041. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.528.000	0	945.816	315.272	1.261.088	82.53 %	266.912
000042. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	1.000	0	0	0	0	0.00 %	1.000
000043. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	1.000	0	0	0	0	0.00 %	1.000
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000	0	4.550.000	350.000	4.900.000	100.00 %	0
000044. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.200.000	0	3.850.000	350.000	4.200.000	100.00 %	0
000045. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	350.000	0	350.000	0	350.000	100.00 %	0
000046. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	350.000	0	350.000	0	350.000	100.00 %	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.054.000	0	5.503.920	1.593.240	7.097.160	88.12 %	956.840
000047. Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.476.000	0	5.359.080	1.593.240	6.952.320	93.00 %	523.680
000048. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	289.000	0	72.420	0	72.420	25.06 %	216.580
000049. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	289.000	0	72.420	0	72.420	25.06 %	216.580
511628 Belanja Uang Makan PPPK	45.725.000	0	13.027.000	8.551.000	21.578.000	47.19 %	24.147.000
000050. Belanja Uang Makan PPPK	45.725.000	0	13.027.000	8.551.000	21.578.000	47.19 %	24.147.000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	7.677.000	0	5.415.000	1.805.000	7.220.000	94.05 %	457.000
000104. Belanja Tunjangan Umum PPPK	7.677.000	0	5.415.000	1.805.000	7.220.000	94.05 %	457.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.504.818.000	0	1.950.554.528	149.555.999	2.100.110.527	84.08 %	398.707.473
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	546.177.000	0	537.798.926	1.022.100	538.821.026	98.65 %	7.355.974
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	546.177.000	0	537.798.926	1.022.100	538.821.026	98.65 %	7.355.974
000051. Keperluan sehari-hari Perkantoran	33.024.000	0	24.791.852	1.022.100	25.813.952	78.17 %	7.210.048
000052. Prambakti ( 6 org x 8 bulan )	229.680.000	0	229.680.000	0	229.680.000	100.00 %	0
000053. Satpam ( 5 org x 8 Bln )	224.628.000	0	224.628.074	0	224.628.074	99.94 %	145.926
000054. THR Prambakti 6 Org X 1 Bln )	30.624.000	0	30.624.000	0	30.624.000	100.00 %	0
000055. THR Satpam ( 5 org X 1 bln )	28.075.000	0	28.075.000	0	28.075.000	100.00 %	0
002.0B LANGGANAN DAYA JASA	230.400.000	0	223.415.279	814.112	224.229.391	97.32 %	6.170.609
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	193.600.000	0	192.006.681	315.112	192.321.793	99.34 %	1.278.207

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Halaman 10 dari 25 halaman  
Laporan Bulanan Bulan November 2025 PTUN JAKARTA  
Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode November 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000056. Langganan Internet	190.000.000	0	189.900.000	0	189.900.000	99,98 %	40.000
000057. Lisensi Video Conference	3.600.000	0	2.046.681	315.112	2.361.793	65,61 %	1.238.207
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.800.000	0	2.755.000	499.000	3.254.000	85,63 %	546.000
000058. Biaya Pengiriman Surat Dinas	3.800.000	0	2.755.000	499.000	3.254.000	85,63 %	546.000
522112 Belanja Langganan Telepon	6.000.000	0	2.673.598	0	2.673.598	44,56 %	3.326.402
000059. Langganan Telephone	6.000.000	0	2.673.598	0	2.673.598	44,56 %	3.326.402
522113 Belanja Langganan Air	1.000.000	0	0	0	0	0,00 %	1.000.000
000060. Langganan Air	1.000.000	0	0	0	0	0,00 %	1.000.000
522141 Belanja Sewa	26.000.000	0	25.980.000	0	25.980.000	99,92 %	20.000
000061. Langganan Web Hosting	26.000.000	0	25.980.000	0	25.980.000	99,92 %	20.000
002.0C Pemeliharaan Kantor	611.065.000	0	420.710.671	73.605.830	494.316.501	80,89 %	116.748.499
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	303.858.000	0	189.628.600	45.284.670	234.913.270	77,31 %	68.944.730
000062. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan	303.858.000	0	189.628.600	45.284.670	234.913.270	77,31 %	68.944.730
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	156.000	0	0	0	0	0,00 %	156.000
000063. Pemeliharaan Rumah Dinas ( 4 Unit )	156.000	0	0	0	0	0,00 %	156.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	307.051.000	0	231.082.071	28.321.100	259.403.231	84,48 %	47.647.769
000064. Pemeliharaan Lift	54.500.000	0	54.390.000	0	54.390.000	99,80 %	110.000
000065. Bensin Mobil Sewa Ketua	27.000.000	0	19.551.825	4.900.000	24.451.825	90,56 %	2.548.175
000066. Pemeliharaan AC Cassete	43.611.000	0	30.089.800	12.343.500	42.433.300	97,30 %	1.177.700
000067. Pemeliharaan Laptop	16.790.000	0	12.336.500	0	12.336.500	73,48 %	4.453.500
000068. Pemeliharaan PC	17.520.000	0	5.550.000	907.960	6.457.960	36,86 %	11.062.040
000069. Pemeliharaan Printer	10.350.000	0	3.218.000	1.300.000	4.518.000	43,65 %	5.832.000
000070. Pemeliharaan AC Split	28.060.000	0	25.109.950	2.920.000	28.029.950	99,89 %	30.050
000071. Pemeliharaan Mesin Pompa	27.150.000	0	27.150.000	0	27.150.000	100,00 %	0
000072. Kendaraan Roda 2	3.500.000	0	1.291.900	637.800	1.929.700	55,13 %	1.570.300
000073. Kendaraan Roda 4	76.620.000	0	50.444.096	5.311.900	55.755.996	72,77 %	20.864.004
000103. Pemeliharaan Barang Elektronik Lainnya	1.950.000	0	1.950.000	0	1.950.000	100,00 %	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode November 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 6 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0D Operasional Lainnya	222.246.000	0	179.097.332	19.273.957	198.371.289	89,26 %	23.874.711
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	83.656.000	0	82.918.000	0	82.918.000	99,12 %	738.000
000074. Pakaian Dinas Pramubhakti	4.428.000	0	3.690.000	0	3.690.000	83,33 %	738.000
000075. Pakaian Dinas Hakim 26 Org	21.788.000	0	21.788.000	0	21.788.000	100,00 %	0
000076. Pakaian Dinas Pegawai 60 Org	50.736.000	0	50.736.000	0	50.736.000	100,00 %	0
000077. Pakaian Dinas CPNS 2 Org	1.676.000	0	1.676.000	0	1.676.000	100,00 %	0
000078. Pakaian Dinas PPKP 1 Org	838.000	0	838.000	0	838.000	100,00 %	0
000079. Pakaian Dinas Satpam	4.190.000	0	4.190.000	0	4.190.000	100,00 %	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	70.340.000	0	53.100.000	4.980.000	58.080.000	82,57 %	12.260.000
000080. Honor PPABP	2.400.000	0	490.000	490.000	980.000	39,84 %	1.480.000
000081. Honor KPA	21.600.000	0	14.400.000	1.800.000	16.200.000	75,00 %	5.400.000
000082. Honor PPK	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	100,00 %	0
000083. Honor Penguji Tagihan Penandatanganan SPM	9.000.000	0	6.750.000	750.000	7.500.000	83,33 %	1.500.000
000084. Honor Bendahara Penerimaan	3.600.000	0	2.700.000	300.000	3.000.000	83,33 %	600.000
000085. Honor Bendahara Pengeluaran	7.920.000	0	5.940.000	660.000	6.600.000	83,33 %	1.320.000
000086. Honor Staf Keuangan (2 org x 12 Bln)	11.760.000	0	8.820.000	980.000	9.800.000	83,33 %	1.960.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	68.250.000	0	43.079.332	14.293.957	57.373.289	84,06 %	10.876.711
000087. Biaya perkantoran sehari-hari (91 Org)	68.250.000	0	43.079.332	14.293.957	57.373.289	84,06 %	10.876.711
002.0G Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding	23.400.000	0	1.142.000	930.000	2.072.000	8,85 %	21.328.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.200.000	0	992.000	780.000	1.772.000	7,98 %	20.428.000
000088. Transportasi (2 org x 3 kegiatan)	2.700.000	0	0	0	0	0,00 %	2.700.000
000089. Uang Harian (2 org x 1 hari x 3 kegiatan)	4.950.000	0	0	780.000	780.000	15,76 %	4.170.000
000090. Tiket (2 org x 1 hari x 3 kegiatan)	8.250.000	0	0	0	0	0,00 %	8.250.000
000091. Penginapan (2 org x 1 hari x 3 kegiatan)	6.300.000	0	992.000	0	992.000	15,75 %	5.308.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000	0	150.000	150.000	300.000	25,00 %	900.000
000092. Perjalanan Dinas Dalam Kota (2 Org x 4 keg)	1.200.000	0	150.000	150.000	300.000	25,00 %	900.000
002.0H Konsultasi ke KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL/KANWIL DJKN/BKN/BKD	1.050.000	0	120.320	900.000	1.020.320	97,17 %	29.680

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode November 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.050.000	0	120.320	900.000	1.020.320	97.17 %	29.680
000093. Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 Org x 7 keg)	1.050.000	0	120.320	900.000	1.020.320	97.17 %	29.680
002.01 Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	870.480.000	0	594.270.000	53.010.000	647.280.000	74.36 %	223.200.000
522141 Belanja Sewa	870.480.000	0	594.270.000	53.010.000	647.280.000	74.36 %	223.200.000
000094. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (26 Orang x 12 Bln)	870.480.000	0	594.270.000	53.010.000	647.280.000	74.36 %	223.200.000
<b>EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>35.00 %</b>	<b>195.000</b>
<b>EBD.503 Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>35.00 %</b>	<b>195.000</b>
<b>051 Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>35.00 %</b>	<b>195.000</b>
051.0A Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	105.000	105.000	35.00 %	195.000
521211 Belanja Bahan	300.000	0	0	105.000	105.000	35.00 %	195.000
000096. Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	105.000	105.000	35.00 %	195.000



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

### LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode November 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>63,250,000</b>	<b>0</b>	<b>30,625,000</b>	<b>8,995,000</b>	<b>39,620,000</b>	<b>62.64 %</b>	<b>23,630,000</b>
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	63,250,000	0	30,625,000	8,995,000	39,620,000	62.64 %	23,630,000
BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	63,250,000	0	30,625,000	8,995,000	39,620,000	62.64 %	23,630,000
AEA Koordinasi	29,845,000	0	9,700,000	5,740,000	15,500,000	51.93 %	14,345,000
AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	29,845,000	0	9,700,000	5,740,000	15,500,000	51.93 %	14,345,000
051 Pelaksanaan Pengamanan Sidang	29,845,000	0	9,700,000	5,740,000	15,500,000	51.93 %	14,345,000
051.0A Pelaksanaan	29,845,000	0	9,700,000	5,740,000	15,500,000	51.93 %	14,345,000
521211 Belanja Bahan	29,845,000	0	9,700,000	5,740,000	15,500,000	51.93 %	14,345,000
000001. Konsumsi Pengamanan Sidang (25 org x 30 kali)	29,845,000	0	9,700,000	5,740,000	15,500,000	51.93 %	14,345,000
BCA Perkara Hukum Perseorangan	405,000	0	405,000	0	405,000	100.00 %	0
BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	405,000	0	405,000	0	405,000	100.00 %	0
051 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	405,000	0	405,000	0	405,000	100.00 %	0
051.0A Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	405,000	0	405,000	0	405,000	100.00 %	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180,000	0	180,000	0	180,000	100.00 %	0
000002. Pengiriman Pemberitahuan Panggilan	180,000	0	180,000	0	180,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	225,000	0	225,000	0	225,000	100.00 %	0
000003. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00 %	0
000004. Alat Tulis Kantor	125,000	0	125,000	0	125,000	100.00 %	0
OBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33,000,000	0	20,400,000	3,255,000	23,715,000	71.86 %	9,285,000
OBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33,000,000	0	20,400,000	3,255,000	23,715,000	71.86 %	9,285,000
051 Pos Bantuan Hukum	33,000,000	0	20,400,000	3,255,000	23,715,000	71.86 %	9,285,000
051.0A tanpa sub komponen	33,000,000	0	20,400,000	3,255,000	23,715,000	71.86 %	9,285,000
521211 Belanja Bahan	4,200,000	0	1,200,000	855,000	2,115,000	50.36 %	2,085,000
000009. ATK Layanan Pos Bantuan Hukum	4,200,000	0	1,200,000	855,000	2,115,000	50.36 %	2,085,000
522131 Belanja Jasa Konsultan	28,800,000	0	19,200,000	2,400,000	21,600,000	75.00 %	7,200,000
000010. Jasa Layanan Konsultan Hukum (3 Jam x 2 Hari x 4	28,800,000	0	19,200,000	2,400,000	21,600,000	75.00 %	7,200,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

### LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode November 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Mg x 12 Bln)	28.800.000	0	19.200.000	2.400.000			7.200.000



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan November 2025 agenda rapat meliputi :

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan seluruh Aparatur Sipil Negara agar dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara profesional dengan tetap berpegang teguh dan berpedoman pada KEPPH, Kode Etik Kepaniteraan, Kode Etik ASN dan selanjutnya menguraikan point-point Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017, berikut penjelasannya :
  1. Perma No. 7 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya;
  2. Perma No. 8 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya;
  3. Perma No. 9 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*);
  4. Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan apresiasi kepada jajaran yang berada di bawahnya, dimulai dari para Hakim yang telah mengurangi perkara-perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan sehingga warna merah yang muncul pada aplikasi MIS semakin sedikit.
- Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga memberikan apresiasi kepada Bapak Panitera beserta jajarannya yang telah membuat banyak perubahan dan pembenahan dalam beberapa hal salah satunya adalah bidang Panitera Muda Hukum yang telah mendata dan membenahi *box file*.
- Bapak H. Husban, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga memberikan apresiasi kepada Bapak Sekretaris yang telah bergerak cepat melakukan pembenahan dan perubahan dalam beberapa hal salah satunya



## **LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA**

- adalah perbaikan toilet umum yang digunakan oleh para pihak atau pengunjung sehingga saat ini toilet umum kini sudah bersih dan nyaman digunakan.
- Selain memberikan apresiasi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga memberikan instruksi kepada Bapak Sekretaris agar tahun depan dianggarkan perawatan gedung dan penyediaan rak penyimpanan arsip perkara.
  - Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga menginstruksikan kepada Bapak Sekretaris agar merapikan ruang Cakim Lantai 2 yang saat ini sedang tidak terpakai, sehingga dapat digunakan menjadi ruangan penerima tamu dari luar seperti Bawas atau BPK.
- b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.

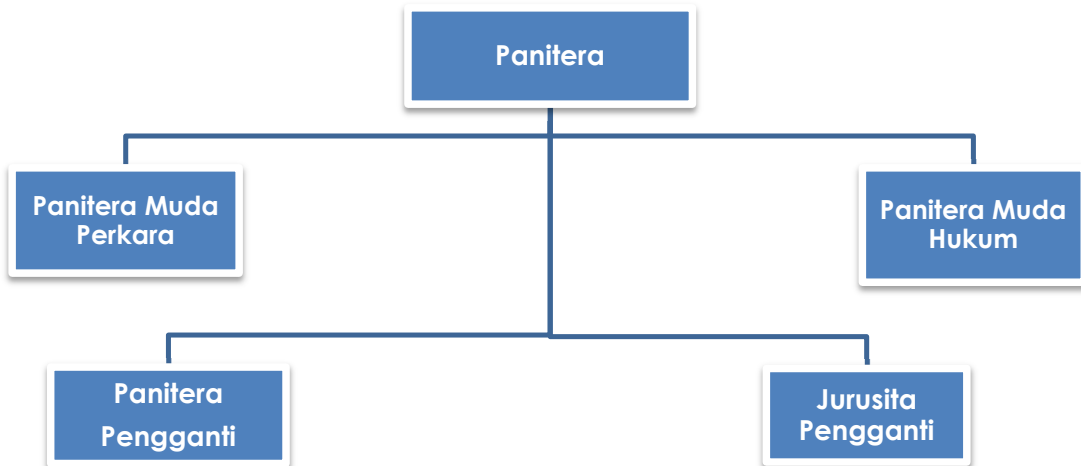


# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

### Struktur Organisasi Kepaniteraan



#### 1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.
- Membuat jurnal keuangan perkara.



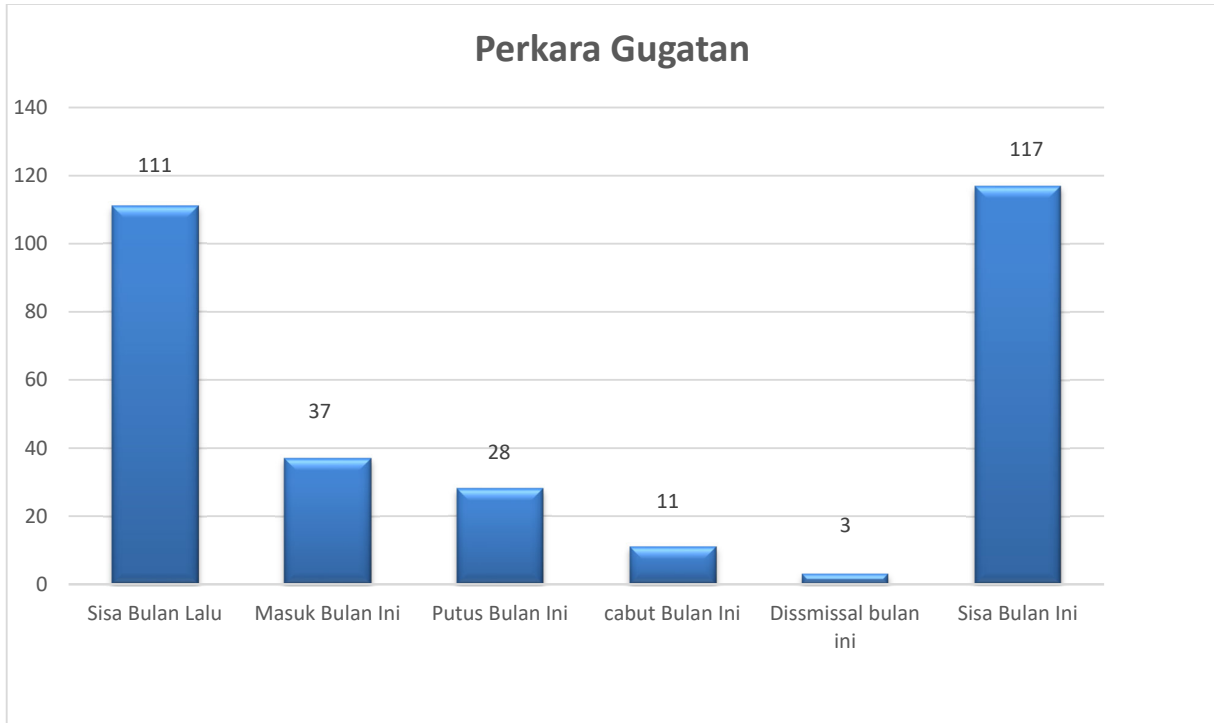
## **LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA**

- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyesuaian dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2024.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2025



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

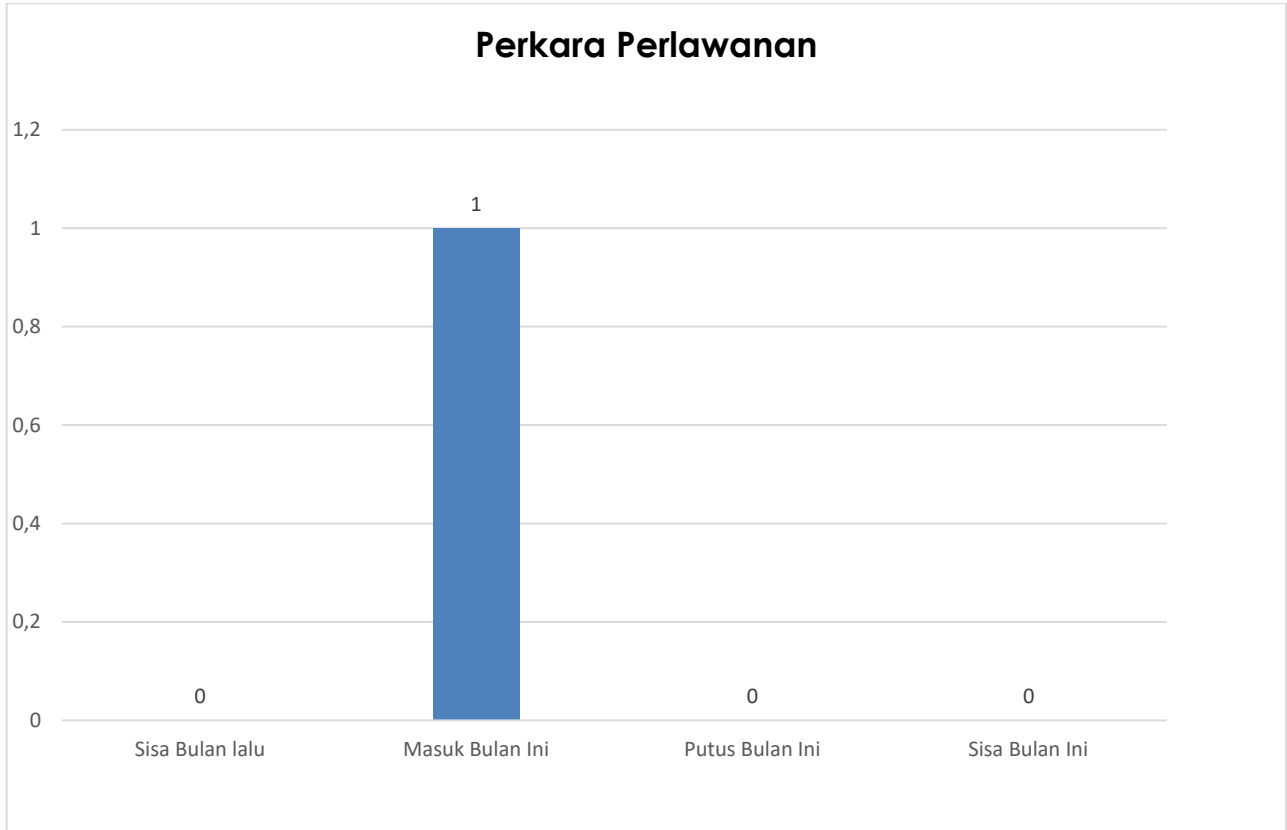
## Keadaan Perkara



Catatan : Total Putus bulan ini adalah ( di cabut + dismissal + Putus bulan ini )  
 $11 + 3 + 18 = 32$  Perkara

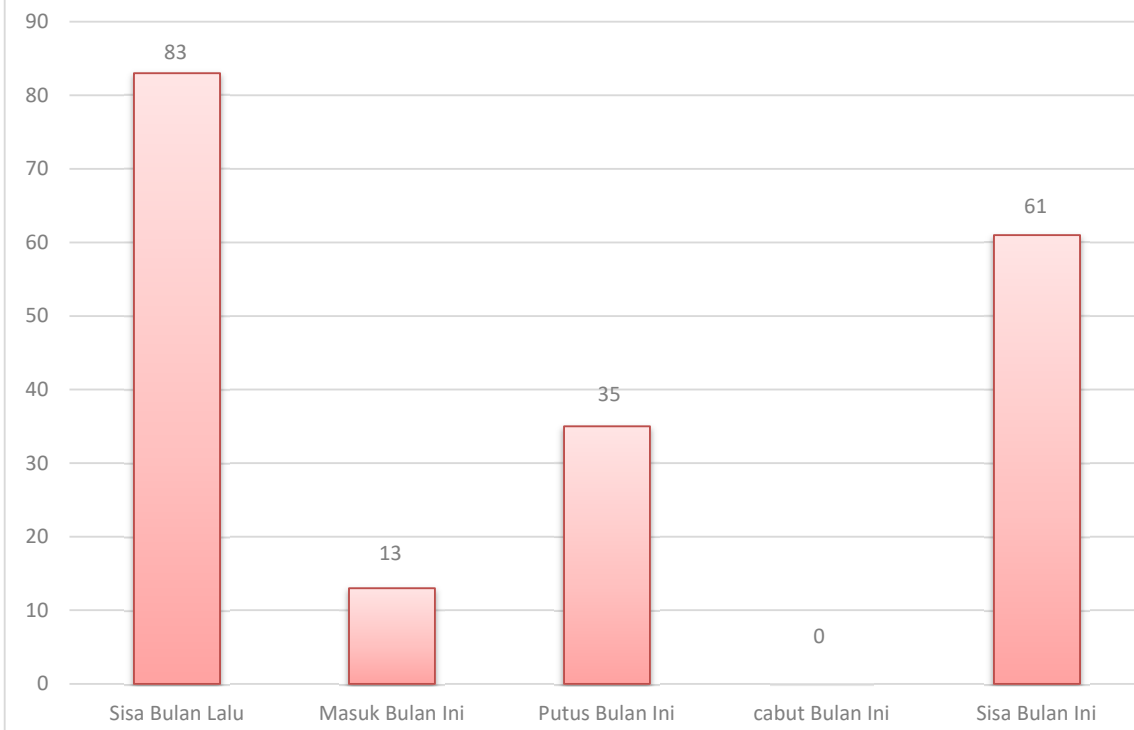


# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

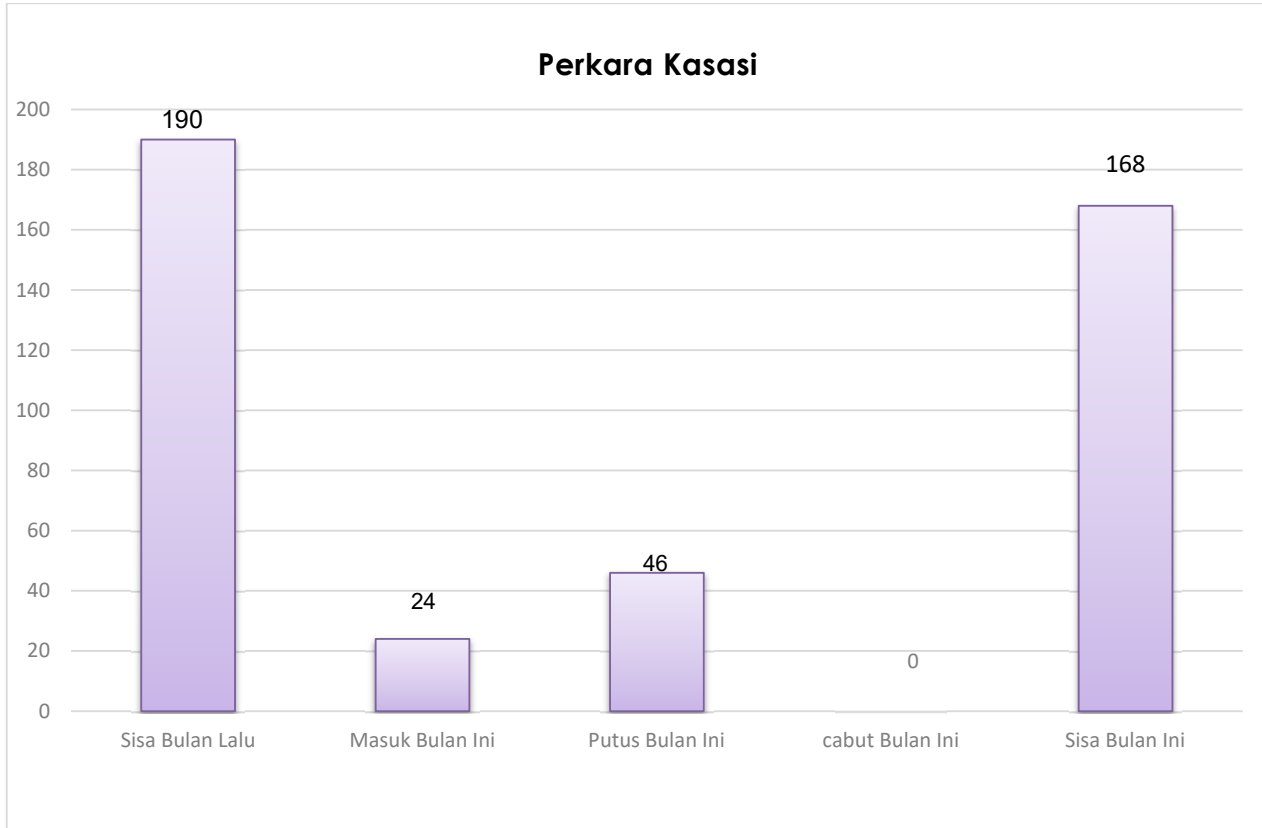


# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## Perkara Banding



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## 2. Kepaniteraan Muda Hukum

### - Laporan Jenis Perkara Bulan November 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang  
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN JENIS PERKARA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
BULAN NOVEMBER TAHUN 2025

FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Sas Bulan Lalu	Perkara		Pengugat		Tergugat		Perlawanan		Putusan				Permohonan		Terima Berkas		Keterangan								
			Masih Didebit	Jumlah	Perorangan	Badan Hukum	Perorangan	Badan Hukum	Dikawatirkan	Ditolak/Dikawatirkan	Dikawatirkan	Ditolak/Dikawatirkan	Dikawatirkan	Ditolak/Dikawatirkan	Dikawatirkan	Ditolak/Dikawatirkan	Dikawatirkan	Ditolak/Dikawatirkan									
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
<b>A GUGATAN</b>																											
1	Pertanahan	14	7	-	21	6	1	1	5	2	-	-	-	-	1	-	3	18	-	4	2	1	4	2	-	1 Perkara Masuk PLW	
2	Kepegawaian	6	4	1	9	4	-	3	1	-	-	-	-	1	-	1	8	-	2	-	-	7	4	-	-		
3	Perjinan	12	5	1	16	-	5	5	-	-	-	-	-	2	-	2	4	12	2	7	2	3	7	10	-		
4	Lingkungan Hidup	3	1	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-		
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Badan Hukum/ Parpol	22	6	1	27	1	5	6	-	-	-	-	-	4	1	5	22	5	4	-	-	5	3	1	-		
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Penggantian Antar Waktu	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	5	-		
13	Pengadaan Tanah	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Fikrif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	13	6	-	19	3	3	4	2	1	-	-	-	2	-	3	16	3	-	6	1	2	13	8	-		
17	Merek	2	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Lain Lain	31	8	3	36	6	2	5	3	-	-	-	3	-	1	1	5	31	3	6	1	-	9	9	1		
<b>JUMLAH</b>		<b>111</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>143</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>117</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>10</b>		

MENGETAHUI



Jakarta, 01 Desember 2025  
PANI LHA,

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.  
Nip. 19731012200031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



### - Laporan Penanganan Pengaduan Bulan November 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang  
Jakarta Timur 13950, Telp.(021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
BULAN NOVEMBER TAHUN 2025

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 01 Desember 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 22 dari 25 halaman  
Laporan Bulanan Bulan November 2025 PTUN JAKARTA  
Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

## LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

### C. KEGIATAN LAIN – LAIN

- 10 November 2025 – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melaksanakan *Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2025* di halaman kantor satuan kerja. Kegiatan ini berlangsung khidmat pada pukul 08.00 WIB sesuai dengan ketentuan dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Upacara tahun ini mengusung tema nasional **“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan”**, yang mengandung makna mendalam tentang pentingnya meneladani semangat juang para pahlawan dalam kehidupan dan pengabdian masa kini. Upacara dipimpin langsung oleh **Yang Mulia Bapak Ketua PTUN Jakarta, H. Husban, S.H., M.H.**, dan diikuti oleh seluruh unsur pimpinan, para hakim, pejabat kepaniteraan, pejabat kesekretariatan, serta seluruh aparat PTUN Jakarta. Seluruh peserta mengikuti jalannya upacara dengan penuh khidmat dan semangat nasionalisme.



Pada momen inti upacara, **Bapak H. Husban, S.H., M.H.** selaku pembina upacara membacakan **Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia**. Dalam amanat tersebut disampaikan pesan bahwa semangat kepahlawanan harus terus hidup di setiap insan, tidak hanya dalam bentuk perjuangan fisik, tetapi juga melalui karya dan pengabdian nyata.

“Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian,” demikian salah satu kutipan yang disampaikan dalam amanat tersebut. Amanat ini juga menjadi pengingat bagi seluruh aparat peradilan untuk meneladani nilai-nilai kepahlawanan dalam menjalankan tugas — bekerja dengan **jujur, tangguh, berdampak**, serta terus berjuang memastikan **keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat**.



## BAB III

### TELAAHAN

#### Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

#### Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak ringan oleh karena itu PTUN Jakarta membutuhkan tambahan anggaran.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 76 ASN, dan 11 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 4 (empat) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## BAB IV

### KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

#### 1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan November 2025 berjalan dengan lancar.

#### 2. USUL DAN SARAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran Biaya Tambahan untuk PC All in One.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional ( Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ).

Jakarta, 03 Desember 2025

Mengetahui  
Ketua,

Sekretaris,



**KETUA PTUN JAKARTA**  
Ditandatangani secara elektronik  
**HUSBAN**



**R. Syuman Auliaurohman, S.H., M.H..**

NIP. 198410162008051001

